

Feminist International Assistance Policy Kanada: Studi Kasus Bantuan CFLI untuk Jakarta Feminist 2017–2021

Sekarbumi Drajad Al Anbiya¹, Musa Maliki², M. Chairil Akbar Setiawan³

^{1,2,3} *Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received : 19 July 2022
Final Revision : 28 September 2022
Available Online : 01 November 2022

KEYWORD

Feminist International Assistance Policy, feminist foreign policy, foreign aid, gender equality

KATA KUNCI

Feminist International Assistance Policy Kanada, kebijakan luar negeri feminis, bantuan luar negeri, kesetaraan gender

CORRESPONDENCE

Phone : 087887994240
E-mail : sekarbumi.anbiya@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the assistance provided by the Canada Fund for Local Initiatives to the Jakarta Feminist in the 2017-2021 period as one of the proofs that Canada's Feminist International Assistance Policy has so far been running smoothly. In addition, this article also aims to correct the misunderstandings of foreign policy observers regarding FIAP as a feminist foreign policy. FIAP has so far only used elements of Liberal Feminism as a lens of observation to focus on their foreign aid agenda to achieve a safe, inclusive, and prosperous world development. Therefore, this article argues that FIAP does contain elements of Feminism but focuses more on assisting non-profit organizations in developing countries, one of which is Indonesia. By using a descriptive qualitative research method that processes primary and secondary data from personal interviews and literature review, this article finds that CFLI, under the auspices of FIAP, has been successful in assisting the Jakarta Feminist in 2017-2021 and has also managed to reveal that FIAP is not a feminist foreign policy. FIAP oversees several foreign aid programs initiated by Canada for developing countries, one of which is CFLI.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bantuan yang diberikan Canada Fund for Local Initiatives kepada Jakarta Feminist periode 2017–2021 sebagai salah satu bukti bahwa Feminist International Assistance Policy Kanada sejauh ini berjalan dengan lancar. Selain itu, artikel ini juga bertujuan meluruskan kesalahpahaman pengamat kebijakan politik luar negeri dalam memahami FIAP Kanada sebagai kebijakan luar negeri feminis. Pada faktanya, FIAP Kanada selama ini hanya menggunakan unsur Feminisme Liberal sebagai lensa pengamatan untuk berfokus dalam agenda bantuan luar negeri demi mencapai pembangunan dunia yang aman, inklusif, dan sejahtera. Oleh sebab itu, artikel ini berargumen bahwa FIAP Kanada memang memuat unsur-unsur Feminisme tetapi lebih berfokus untuk memberikan bantuan kepada organisasi non-profit di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mengolah data primer dan sekunder dari wawancara pribadi dan kajian pustaka, artikel ini menemukan bahwa CFLI di bawah naungan FIAP sukses dalam memberikan bantuan kepada Jakarta Feminist periode 2017–2021, dan juga berhasil mengungkapkan bahwa memang FIAP bukanlah kebijakan luar negeri feminis Kanada. FIAP menaungi beberapa program bantuan luar negeri yang diinisiasi oleh Kanada untuk negara-negara berkembang, salah satunya CFLI.

Pendahuluan

Paham Feminisme pertama kali masuk ke dalam ranah Hubungan Internasional (HI) pada dekade 1980-an. Pada saat itu, para akademisi, teoretikus, peneliti dan praktisi kebijakan HI meneliti gender sebagai suatu disiplin dalam politik global¹. Mereka mengkritik bahwa pembahasan-pembahasan dalam ranah HI selalu tentang isu-isu *high politics* (yang berkaitan dengan keamanan negara) tanpa terlalu memedulikan isu-isu *low politics* (yang berkaitan dengan keadaan sosial dan keamanan individu)². Mereka kemudian berargumen bahwa paham Feminisme dan partisipasi wanita akan membantu mengarusutamakan isu-isu gender dalam HI, termasuk dalam kajian politik luar negeri dengan mengungkap ketidakadilan dan diskriminasi gender di tingkat global³.

Lebih lanjut, para Feminis Liberal pun turut menyatakan bahwa ada pembatasan dan pengekan sosial terhadap kaum wanita, di mana mereka tidak bisa mendapatkan atau mencapai hal-hal yang sama dengan kaum pria⁴. Paham Feminisme Liberal ini kemudian menjadi salah satu perspektif yang kerap digunakan para ahli Feminis untuk menganalisis isu-isu politik global, salah satunya mengenai kebijakan luar negeri.

Paham Feminisme Liberal pertama kali

dirumuskan ke dalam kebijakan luar negeri pada tahun 2014 oleh Swedia⁵. Kebijakan luar negeri Swedia ini dikatakan feminis sebab bertujuan untuk memastikan bahwa opini, pemikiran, dan pendapat kaum wanita disertakan dan diperhitungkan dalam desain mekanisme dan sistem analisis politik luar negeri. Di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri—Margot Wallström—Swedia mencanangkan Swedish Feminist Foreign Policy (FFP) sebagai landasan ideologi bagi Swedia untuk menjamin kesetaraan gender dan dukungan penuh dari kepemimpinan politiknya⁶.

Hal ini kemudian diikuti oleh pencanangan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kanada pada Juni 2017 di bawah pimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau. FIAP juga menggunakan lensa FFP untuk melihat berbagai aspek hubungan internasional Kanada yang juga mencakup Canadian National Action Plan on Women, Peace and Security⁷. Melalui FIAP, Kanada menyatakan bahwa mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita adalah *cara terbaik* untuk membangun dunia yang lebih damai, inklusif, dan sejahtera. Maka dari itu, diharapkan, FIAP dapat membantu melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang setara, serta membantu kaum wanita mendapat akses yang lebih adil terhadap sumber daya dalam rangka mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan⁸.

Kanada mengimplementasikan FIAP

¹ J. Ann Tickner and Laura Sjoberg, "Introduction: International Relations through Feminist Lenses," in *Feminism and International Relations: Conversations about the Past, Present and Future* (Milton Park: Routledge, 2013), 3.

² Sarah Smith, "Introducing Feminism in International Relations Theory," January 4, 2018, 1–2, <https://www.e-ir.info/2018/01/04/feminism-in-international-relations-theory/>.

³ Karin Aggestam, Annika Bergman Rosamond, and Annika Kronsell, "Theorising Feminist Foreign Policy," *International Relations* 33, no. 1 (November 27, 2018): 29–30, <https://doi.org/10.1177%2F0047117818811892>.

⁴ Chris Beasley, "Starters on the Feminist Menu: Liberal, Radical and Marxist/Socialist Feminisms," in *What Is Feminism? An Introduction to Feminist Theory* (Australia: Sage Publications, 1999), 51.

⁵ Aggestam, Rosamond, and Kronsell, "Theorising Feminist Foreign Policy," 23.

⁶ Aggestam, Rosamond, and Kronsell, 327.

⁷ Lyric Thompson, Ahmed Spogmay, and Tanya Khokhar, "Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update," 2021, 5.

⁸ GAC, "Canada's Feminist International Assistance Policy" (Global Affairs Canada, 2017), https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf?_ga=2.41733986.1120564317.1653558061-173526061.1653558060.

terhadap program-program bantuan luar negeri yang sudah ada, salah satunya Canada Fund for Local Initiatives (CFLI, berdiri tahun 1997) yang merupakan program bantuan luar negeri untuk proyek-proyek berskala kecil dan berdampak tinggi yang diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah (NGO) di negara-negara berkembang. Organisasi-organisasi ini tentunya haruslah yang memiliki tujuan meningkatkan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam isu-isu yang penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan bersama⁹.

Jakarta Feminist menjadi salah satu NGO yang mendapat bantuan rutin selama kurang lebih empat tahun dari CFLI. Dana bantuan pertama kali diberikan pada tahun 2017 untuk pelaksanaan Women's March¹⁰. Kemudian, ketika Jakarta Feminist resmi menjadi badan hukum pada tahun 2019, CFLI menjadi donatur rutin selama kurang lebih tiga tahun berturut-turut¹¹. Pada masa pandemi COVID-19, CFLI juga terus memberikan dana bantuan kepada Jakarta Feminist, yang kemudian digunakan untuk mengadakan berbagai kegiatan dan pelatihan secara daring guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap isu gender dan Feminisme. Topik utama yang menjadi sorotan selama masa pandemi adalah kekerasan berbasis gender (KBG) dan KBG *online* (KBGO). Tidak hanya itu, dana bantuan juga digunakan untuk mengembangkan sebuah direktori lembaga layanan bagi para korban KBG di Indonesia bernama Cari Layanan¹².

Dalam penelitian mengenai bantuan

FIAP Kanada melalui CFLI kepada Jakarta Feminist ini, penulis menemukan beberapa kritik dari beberapa ahli pengamat kebijakan luar negeri—Jessica Cadesky (2020) dan Sam E. Morton dkk (2020)—tentang FIAP Kanada. Dikatakan bahwa FIAP Kanada belum sepenuhnya berhasil menjadi kebijakan luar negeri feminis karena masih memiliki banyak kekurangan¹³.

Maka dari itu, artikel ini sekaligus akan meluruskan pemahaman tentang FIAP Kanada sebagai kebijakan bantuan luar negeri yang menggunakan unsur Feminisme Liberal sebagai sarana untuk mencapai visimisinya yang berkaitan erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk itu, penulis akan menganalisis secara singkat perbedaan tujuan utama antara kebijakan luar negeri feminis Kanada dengan Swedia—di mana Swedia menjadikan kesenjangan gender sebagai permasalahan struktural yang harus segera ditanggulangi, sementara Kanada justru berfokus untuk mengentaskan isu-isu global—seperti kelaparan, kemiskinan dan masalah iklim—walau tetap menggunakan lensa dan kerangka kerja feminis.

Hal ini penting untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk melihat kesuksesan FIAP Kanada dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Jakarta Feminist di Indonesia, sekaligus untuk menegaskan bahwa FIAP Kanada bukanlah kebijakan luar negeri feminis, melainkan program bantuan luar negeri yang berorientasi feminis.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Alan Bryman menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih memperhatikan kata-kata daripada

⁹ GAC, "The Canada Fund for Local Initiatives," Global Affairs Canada, October 19, 2015, <https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/index.aspx?lang=eng>.

¹⁰ Jakarta Feminist, "Women's March Jakarta," 2017, <https://jakartafeminist.com/wmj/>.

¹¹ Naila Rizki Zaqiah, CFLI Funds for Jakarta Feminist, June 22, 2022.

¹² Jakarta Feminist, "Laporan tahunan: Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta 2020," Laporan Tahunan (Jakarta Feminist, January 29, 2021).

¹³ Jessica Cadesky, "Built on Shaky Ground: Reflections on Canada's Feminist International Assistance Policy," *International Journal* 75, no. 3 (September 10, 2020): 302–5, <https://doi.org/10.1177%2F0020702020953424>.

angka. Lebih lanjut, Bryman memaparkan tiga fitur penting yang setidaknya harus diperhatikan dalam suatu penelitian kualitatif. Untuk yang pertama adalah metode induktif yang menghubungkan antara data dan teori penelitian. Selanjutnya adalah interpretasi peneliti terhadap obyek penelitiannya. Untuk yang terakhir adalah konstruksi hubungan antara suatu fenomena dengan para individu yang terlibat¹⁴.

Kemudian, dengan metode kualitatif deskriptif, penulis akan menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan bagaimana FIAP Kanada berperan dalam memberikan bantuan bagi Jakarta Feminist, sekaligus meluruskan kesalahpahaman tentang FIAP Kanada yang disebut sebagai kebijakan luar negeri feminis oleh beberapa ahli terdahulu.

Data-data primer dan sekunder untuk analisis artikel ini diperoleh melalui *in-depth interview* dengan Colin Wetmore (First Secretary dan Program Manager Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) Indonesia–Timor Leste) dan Naila Rizqi Zaqiah (Officer Advokasi Jakarta Feminist), serta jurnal artikel dan buku-buku yang diperoleh melalui *internet-based research*.

Diskusi

Pada abad ke-18 dan ke-19, Feminisme Liberal muncul dan menjadi salah satu aliran feminisme yang paling banyak dikenal hingga saat ini. Aliran ini kemudian dianggap sebagai sinonim dari paradigma Feminisme, sebab pertanyaan-pertanyaan teoritis dan filosofis yang kerap diperdebatkan—misalnya, “*Apa itu feminisme?*” dan “*Apa yang menjadikan Anda seorang feminis?*”—mengacu pada asumsi-asumsi dasar yang diusung oleh aliran Feminisme Liberal, yaitu bahwa kaum wanita tidak dipandang secara setara dengan kaum pria. Feminisme Liberal menyatakan bahwa ada pembatasan dan pengekangan

sosial terhadap kaum wanita, di mana mereka tidak bisa mendapatkan atau mencapai hal-hal yang sama dengan kaum pria¹⁵.

Kaum Feminis Liberal berusaha menentang sistem yang penuh pengekangan dan pembatasan ini dengan menjelaskan bahwa gender dan jenis kelamin tidak selalu berkesinambungan. Seseorang yang terlahir sebagai pria tidak selalu memiliki sifat pemberani atau mandiri. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang terlahir sebagai wanita tidak selalu memiliki sifat lemah dan harus selalu dilindungi. Bahkan, bisa saja seseorang memiliki sifat maskulin dan feminin di saat yang bersamaan. Lebih lanjut, kaum wanita dan pria tidak seharusnya dibeda-bedakan dengan hanya berpatok pada gender dan jenis kelamin. Sebab, Feminis Liberal percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah setara dan sama—memiliki hak-hak atas hal-hal yang sama. Dengan argumentasi ini, kaum Feminis Liberal juga menekankan bahwa **mereka tidak menginginkan posisi yang lebih tinggi atau unggul di atas pria, melainkan kesetaraan antar pria dan wanita.**

Dalam HI, para ahli Feminis Liberal berusaha menghapus stereotip-stereotip bahwa dunia politik adalah “dunia para pria” dan berusaha menunjukkan bahwa kaum wanita memiliki potensi yang sama dengan kaum pria, mampu berperan dengan baik, serta memiliki andil yang signifikan dalam dunia politik. Feminisme Liberal dalam HI berusaha untuk menegakkan kesetaraan gender, tidak hanya dalam sektor sosial, tetapi juga sektor politik, ekonomi, dan keamanan. Feminis Liberal HI percaya bahwa lensa feminisme dapat membantu menganalisa bagaimana suatu kebijakan luar negeri memengaruhi kehidupan wanita.

¹⁴ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 380.

¹⁵ Beasley, “Starters on the Feminist Menu: Liberal, Radical and Marxist/Socialist Feminisms,” 51.

Feminist Foreign Policy (FFP)

Konsep FFP berangkat dari kesadaran bahwa sebagian besar kebijakan luar negeri didominasi oleh kaum pria—terutama dalam bidang pertahanan dan diplomasi. Hal ini tidak lepas dari stereotip atau stigma yang telah dibangun sejak dulu dalam struktur masyarakat bahwa wanita adalah kaum yang emosional dan tidak rasional sehingga tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau pembuat kebijakan. Aggestam et al. menyatakan bahwa teori Feminisme HI adalah kunci studi kebijakan luar negeri karena menantang ketidaktampakan gender dan ketidakhadiran wanita dalam hubungan internasional, baik secara teori maupun praktek dalam tatanan global. Lebih lanjut, Aggestam et al. menyatakan bahwa pembahasan utama dalam HI cenderung berkisar pada konflik, diplomasi, kedaulatan, keamanan, dan perdagangan global. Maka dari itu, kajian politik luar negeri feminis dapat memperkaya kajian internasional, termasuk isu pemberdayaan dan perlindungan bagi wanita, penghapusan ketidaksetaraan dan kekerasan gender, serta perlindungan bagi kelompok terpinggirkan lainnya¹⁶.

Kemudian, Thompson et al. menjelaskan bahwa FFP tidak hanya oleh wanita dan untuk wanita, tetapi untuk semua masyarakat, terutama kaum minoritas dan marjinal. Sebab, FFP berusaha mengoreksi ketidakseimbangan kekuasaan yang masih dipenuhi sistem patriarkal yang seringkali bersifat rasis dan seksis. FFP menekankan pada pentingnya sudut pandang wanita sebagai salah satu lensa dalam melihat suatu isu atau fenomena HI¹⁷. Namun, FFP tidak memiliki naskah resolusi atau perjanjian khusus yang disepakati oleh berbagai negara. Sebaliknya, penggunaan istilah Feminis untuk menggambarkan kebijakan luar negeri ini memungkinkan fleksibilitas bagi negara-

negara dalam memaknai konsep tersebut dan menetapkan tujuan implementasinya¹⁸.

Akan tetapi, walaupun setiap negara bebas untuk memaknai FFP, mereka tetap harus mempertimbangkan beberapa hal dalam penyusunan kebijakan berorientasi Feminisme tersebut. Thompson et al., merumuskan 5 kunci utama yang harus dimiliki suatu FFP, yaitu: (1) Mengartikulasikan **tujuan** dan merangkul prinsip serta prioritas mengadopsi kebijakan luar negeri feminis; (2) Menetapkan **definisi** kebijakan luar negeri feminis bagi mereka (disarankan untuk menggunakan pendekatan interseksional); (3) Menyebutkan dan menjelaskan **ruang lingkup kebijakan**; (4) Menentukan **hasil dan tujuan pencapaian** (dalam kurun waktu tertentu); (5) Merencanakan **bagaimana dan kapan** kebijakan tersebut diimplementasikan. Kelima kunci utama ini harusnya bertujuan untuk menanggulangi—jika tidak menghapuskan sepenuhnya—kesenjangan antar gender¹⁹. Berarti, sebuah kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang feminis apabila menjadikan permasalahan kesenjangan antar gender sebagai isu utama yang harus ditanggulangi.

Lahirnya FIAP Kanada dan Gender Based Analysis Plus (GBA+)

FIAP dicanangkan pada Juni 2017 di bawah kepemimpinan Justin Trudeau. Dengan berorientasi Feminis, FIAP bertujuan untuk mengadvokasi dan menyerukan upaya kebijakan serta program guna menanggulangi berbagai permasalahan dalam politik global, seperti kesenjangan antar gender, konflik dan peperangan, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan,

¹⁶ Aggestam, Rosamond, and Kronsell, 23–39.

¹⁷ Thompson, Spogmay, and Khokhar, “Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update,” 22.

¹⁸ Jennifer Thomson, “The Growth of Feminist (?) Foreign Policy,” *E-International Relations*, February 10, 2020, 1.

¹⁹ Lyric Thompson, “Feminist Foreign Policy: A Framework” (International Center for Research on Women, 2020), 4–5, https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2021/07/FFP_Framework_EN_June2021update.pdf.

dan perubahan iklim yang ekstrem. Pencanangan FIAP juga merupakan proyeksi dari argumentasi utama Kanada bahwa untuk mencapai perdamaian dan keamanan dunia, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah mencapai kesetaraan gender²⁰. Dengan menyorot berbagai permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dunia, Kanada percaya bahwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, semua itu dipengaruhi oleh dan mempengaruhi ketidaksetaraan gender. Oleh sebab itu, dalam Handbook FIAP dinyatakan bahwa FIAP hadir sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, inklusif dan sejahtera. Kanada yakin bahwa dengan mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan wanita secara efektif, maka tujuan-tujuan tersebut akan tercapai²¹.

FIAP membagi cakupannya menjadi enam bidang aksi, yaitu: (1) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita; (2) Martabat Manusia (*Human Dignity*); (3) Pertumbuhan Bagi Semua Orang (*Growth That Works for Everyone*); (4) Lingkungan dan Iklim; (5) Tata Kelola Inklusif; (6) Perdamaian dan Keamanan²². Secara khusus, bidang aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita menjadi bidang aksi inti sekaligus lintas sektor²³. Di samping itu, keenam bidang aksi ini terintegrasi dengan tujuan-tujuan SDGs sebagai komitmen terhadap pembangunan internasional.

Kanada pun telah lama menerapkan *Gender-based Analysis* (GBA) dalam pemerintahannya sebagai bentuk aksi dari

hasil ratifikasi terhadap Beijing Platform for Action di tahun 1995²⁴. Alat analisis ini pertama kali dibentuk dan dirumuskan oleh departemen Status of Women Canada (SWC) yang kemudian digunakan dalam mengembangkan berbagai kebijakan, program dan layanan di semua departemen dan lembaga federal Kanada. Pada tahun 2015 dan 2017, GBA diperbaharui menjadi Gender Based Analysis Plus (GBA+) oleh Perdana Menteri Justin Trudeau melalui surat mandat²⁵.

Colin Wetmore—First Secretary dan Program Manager Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) Indonesia–Timor Leste—menjelaskan bahwa GBA+ merupakan bentuk lanjutan yang memiliki cakupan lebih luas daripada GBA. Tanda “plus” dalam GBA+ menandakan bahwa alat analisis ini tidak lagi terbatas pada isu-isu perbedaan biologis (jenis kelamin atau seks) dan sosial-budaya (gender), tetapi juga untuk karakteristik-karakteristik lain dalam manusia yang saling bersinggungan dan memengaruhi, seperti ras, etnis, agama, usia, keterbatasan fisik dan mental, juga interaksi sosial dan politik²⁶.

Secara garis besar, GBA+ akan meminta para NGO pemohon dana untuk: (a) mempertimbangkan bagaimana kaum wanita dan anak-anak perempuan akan dipengaruhi oleh masalah yang ingin ditangani proyek mereka, sekaligus memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan menyebabkan kerugian; (b) berkonsultasi dengan wanita dan/atau anak-anak perempuan dalam pengembangan proposal proyek mereka; serta (c)

²⁰ Thompson, Spogmay, and Khokhar, “Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update,” 5.

²¹ GAC, “Canada’s Feminist International Assistance Policy,” vii.

²² GAC, “Canada’s Feminist International Assistance Policy.”

²³ Sam E. Morton, Judyannet Muchiri, and Liam Swiss, “Which Feminism(s)? For Whom? Intersectionality in Canada’s Feminist International Assistance Policy,” *International Journal* 75, no. 3 (September 15, 2020): 331, <https://doi.org/10.1177/02F0020702020953420>.

²⁴ WGE Canada, “Introduction to GBA Plus,” March 31, 2021, https://women-gender-equality.canada.ca/gbaplus-course-cours-acsplu/eng/mod00/mod00_01_01.html.

²⁵ TBS of Canada, “Integrating Gender-Based Analysis Plus into Evaluation: A Primer (2019),” September 30, 2019, <https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/audit-evaluation/evaluation-government-canada/gba-primer.html>.

²⁶ Colin Wetmore, “Everything about CFLI Indonesia,” June 14, 2022.

memastikan bahwa pandangan para wanita dan/atau anak-anak perempuan tersebut menginformasikan desain proyek²⁷. Selain itu, Wetmore mengakui bahwa dengan adanya GBA+, maka tujuan advokasi dan pengarusutamaan isu gender dalam studi kebijakan luar negeri, dapat terlaksana.

Sebuah dokumen yang dikeluarkan SWC menjelaskan bahwa dengan adanya GBA+, maka para pembuat kebijakan dapat memahami dan menyadari bahwa wanita dan pria mendapatkan dampak yang unik dan berbeda dari suatu kebijakan²⁸. GBA+ dimaksudkan untuk memusatkan perhatian para pembuat kebijakan pada dampak-dampak interseksi dari kebijakan yang diusulkan. SWC mengarahkan analisis GBA+ untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah kebijakan ini dengan: (a) mengidentifikasi masalah; (b) menantang asumsi; (c) mengumpulkan fakta dengan meneliti dan berkonsultasi; (d) mengembangkan opsi dan membuat rekomendasi; serta (e) memantau dan mengevaluasi²⁹.

Bantuan Luar Negeri Feminis Kanada terhadap Jakarta Feminist 2017–2021

Jakarta Feminist pertama kali menerima bantuan dari CFLI Indonesia pada tahun 2017. Dana bantuan yang diberikan kemudian digunakan untuk mengadakan kegiatan Feminist Festival 2017 dan Women's March di 20 kota besar di Indonesia³⁰. Sejak saat itu, Jakarta Feminist menjadi penerima rutin dana bantuan dari CFLI Indonesia.

Naila Rizqi Zaqiah—Officer Advokasi

²⁷ Wetmore.

²⁸ SWC, "GENDER-BASED ANALYSIS: A Guide for Policy-Making" (Status of Women Canada, 1996), 4, http://www.pacificwater.org/userfiles/file/IWRM/TooIboxes/gender/gender_based_analysis.pdf.

²⁹ SWC, 7; Vanessa MacDonnell, "Gender-Based Analysis Plus as Constitutional Implementation," *LA REVUE DU BARREAU CANADIEN* 96 (January 1, 2018): 381.

³⁰ Zaqiah, CFLI Funds for Jakarta Feminist.

Jakarta Feminist—menjelaskan bahwa setelah Jakarta Feminist resmi menjadi sebuah badan hukum pada tahun 2019, mereka menjadi salah satu penerima bantuan rutin dari CFLI Indonesia selama kurang lebih tiga tahun (sampai tahun 2021). Pada tahun 2019, dana bantuan yang diberikan kurang lebih sebesar 266 juta rupiah; pada tahun 2020, dana bantuan yang diberikan kurang lebih sebesar 300 juta rupiah³¹; sementara pada tahun 2021, dana bantuan yang diberikan tidak tertera dalam laporan secara spesifik. Dana bantuan tersebut kemudian digunakan untuk mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat—terutama generasi muda—terkait Feminisme. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari berbagai pelatihan, penguatan kapasitas untuk penanganan KBG, pelatihan aktivisme digital, pelatihan pengembangan organisasi feminis, dan kegiatan berjejaring dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS). Dua kegiatan dan program yang paling terkenal dan utama dijalankan oleh Jakarta Feminist dengan dana bantuan tersebut adalah Women's March Jakarta dan Feminist Festival (FemFest).

Sementara itu, selama masa pandemi COVID-19, Jakarta Feminist juga gencar mengadakan kelas dan seminar virtual untuk mengedukasi masyarakat tentang KBG dan KBGO. Hal ini didorong oleh fakta bahwa angka KBG di Indonesia meningkat drastis pada masa pandemi. Maka dari itu, Jakarta Feminist berinisiatif untuk menciptakan sebuah lembaga direktori daring yang dapat membantu korban-korban KBG, yaitu Cari Layanan³².

Untuk mengakses Cari Layanan, pengguna hanya perlu mengetikkan "carilayanan.com" atau alamat samarannya

³¹ Jakarta Feminist, "Laporan Penelitian: Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19," Laporan Penelitian (Jakarta: Jakarta Feminist, February 2021), 11.

³² Zaqiah, CFLI Funds for Jakarta Feminist.

yaitu “belipotbunga.com.” Setelah itu, pengguna dapat mencari bantuan berdasarkan jenis layanan atau lokasi. Beberapa layanan yang dapat ditemukan adalah konsultasi, bantuan hukum, konseling, rumah aman, kesehatan, layanan khusus anak, dan layanan bagi penyandang disabilitas. Setelah pengguna mendapatkan informasi lembaga, layanan dan lokasi yang diinginkan, pengguna dapat menghubungi lembaga tersebut melalui kontak yang telah tercantum berupa nomor telepon dan media sosial. Pengguna juga dapat mencari informasi terkait KBG melalui tulisan-tulisan di blog Cari Layanan³³.

Direktori Cari Layanan dapat digunakan oleh siapa pun dan di mana pun sebab terdapat beberapa *tools* yang bisa membantu melindungi pengguna, seperti: pengaturan pencahayaan dan warna tampilan, serta pengaturan huruf dan tulisan. Semua *tools* ini dapat membantu pengguna dalam mengoperasikan direktori dengan lebih nyaman dan tanpa rasa khawatir. Di samping itu, terdapat pula tombol “Keluar” yang langsung mengalihkan laman ke Google sehingga korban tidak perlu merasa khawatir saat mencari bantuan.

Berdasarkan keterangan dari Naila, pengembangan awal direktori Cari Layanan ini menggunakan dana bantuan dari CFLI Indonesia hingga akhirnya direktori ini sukses diluncurkan pada tahun 2021³⁴.

Selain dari CFLI Indonesia, Jakarta Feminist juga menerima dana bantuan dari CFLI ASEAN. Dana dari CFLI ASEAN ini digunakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan organisasi feminis di negara-negara ASEAN lainnya³⁵. Hal ini terwujud pada September 2020, ketika Jakarta Feminist berkoordinasi dengan Filipina dan Malaysia untuk mengembangkan sebuah jaringan baru bernama Southeast Asia Feminist Action Movement (SEAFAM). Jaringan ini

bertujuan untuk mendorong lebih banyak solidaritas antar organisasi, kelompok, dan kolektif feminis di Indonesia, Filipina, dan Malaysia³⁶.

Dari studi kasus tersebut dapat terlihat bahwa CFLI telah berhasil mencapai tujuan FIAP Kanada, yaitu mengadvokasi dan mengarusutamakan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Wetmore mengakui bahwa Jakarta Feminist merupakan salah satu mitra yang memiliki visi dan misi sejalan dengan CFLI maupun FIAP³⁷. Hal ini juga menguatkan argumentasi peneliti bahwa FIAP bukanlah kebijakan luar negeri feminis Kanada, melainkan suatu payung besar yang berguna untuk menaungi program-program bantuan internasional Kanada.

Perbedaan FIAP Kanada dan FFP Swedia

Walau berangkat dari konsep yang sama, namun terdapat perbedaan pemahaman dan pemaknaan feminis itu sendiri di Swedia dan Kanada. Jennifer Thomson menuliskan bahwa FFP Swedia didukung oleh sensibilitas Feminisme Liberal yang melihat bahwa terdapat ketimpangan kekuatan antara pria dan wanita dalam masyarakat global. Maka dari itu, Swedia berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender yang sistemik dan struktural merupakan masalah utama dalam kebijakan luar negeri dan pembangunan. FFP Swedia hadir sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar ini, dengan tujuan menyeluruh untuk memastikan bahwa wanita dan pria memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri³⁸.

Sementara itu, walau FIAP juga

³³ Zaqiah.

³⁴ Zaqiah.

³⁵ Zaqiah.

³⁶ Jakarta Feminist, “Laporan Penelitian: Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19,” 5.

³⁷ Wetmore, Everything about CFLI Indonesia.

³⁸ Jennifer Thomson, “What’s Feminist about Feminist Foreign Policy? Sweden’s and Canada’s Foreign Policy Agendas,” *International Studies Perspectives* 21, no. 4 (November 30, 2020): 6, <https://doi.org/10.1093/isp/ekz032>.

menggunakan lensa Feminisme Liberal, visi utamanya tetaplah *memberantas kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, inklusif, dan sejahtera*³⁹. Kanada secara tegas tidak melihat kesetaraan gender sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sebuah sarana yang ampuh untuk mencapai visi. Berdasarkan logika Kanada, dengan memberdayakan wanita dan anak perempuan, efeknya akan menyebar ke seluruh masyarakat dan akan berdampak positif dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan sejahtera⁴⁰.

Kemudian, dalam menjalankan kebijakan luar negeri Feminis, Swedia menggunakan kerangka kerja yang mencakup 3R, yaitu: hak para wanita (*Rights*) yang didukung oleh sumber-sumber daya (*Resources*) dan peningkatan representasi wanita (*Representation*)⁴¹. Sementara, kerangka kerja FIAP Kanada mencakup enam bidang aksi, yaitu: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita; Martabat Manusia; Pertumbuhan Bagi Semua Orang; Lingkungan dan Iklim; Tata Kelola Inklusif; dan Perdamaian dan Keamanan⁴². Namun, Thomson berpendapat bahwa kerangka kerja FIAP Kanada tidak menjelaskan bagaimana komitmen tersebut akan dilaksanakan karena memiliki area cakupan sangat luas⁴³.

Untuk lebih memahami perbedaan antara FIAP Kanada dan FFP Swedia, silakan simak tabel berikut ini:

Table 1. Perbandingan FIAP Kanada dan FFP Swedia

	FIAP KANADA	FFP SWEDIA
Orientasi	Feminisme Liberal	Feminisme Liberal

³⁹ Thomson, 6.

⁴⁰ Thomson, 6.

⁴¹ Thomson, 8.

⁴² Thomson, 8.

⁴³ Thomson, 8–9.

Permasalahan utama yang diangkat	Kemiskinan	Kesetaraan gender
Metode penyelesaian masalah utama	Melalui tolak ukur tertentu yang luas/tidak jelas; melalui keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta di negara-negara berkembang.	Melalui perjanjian dan kewajiban hukum dan internasional; melalui komitmen dari berbagai cabang pemerintah Swedia; melalui tolok ukur dan target tertentu.

(Sumber: Thomson, 2020: 9–10)

Walau begitu, Kanada dan Swedia memiliki satu kesamaan dalam interpretasi kebijakan luar negeri feminisnya, yaitu “nasionalisme feminis”⁴⁴. Nasionalisme feminis ini menciptakan merek tertentu bagi kedua negara yang mengaitkan kebijakan feminis mereka dengan pemahaman negara yang ingin diproyeksikan ke ranah internasional. Baik Swedia maupun Kanada berusaha membangun *national brand* sebagai negara yang progresif dalam isu gender. Keduanya yakin—dengan pemahaman dan definisi masing-masing—bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita adalah isu penting dalam politik global. Oleh sebab itu, mereka memproyeksikan “kepercayaan nasional” masing-masing terhadap FFP mereka. Di samping itu, Kanada dan Swedia menanamkan ide-ide Feminis Liberal ke dalam identitas diri nasional dan promosi diri, dan menggunakannya sebagai cara untuk membedakan mereka dari negara lain, terutama untuk menunjukkan bahwa mereka lebih progresif.

Akan tetapi, dalam prakteknya, penulis melihat bahwa FIAP Kanada tentu lebih maju dan progresif dibandingkan dengan FFP Swedia. Hal ini dapat dilihat dari bantuan-bantuan luar negeri feminis yang

⁴⁴ Thomson, 11.

telah diberikan Kanada melalui CFLI dan berbagai program bantuan luar negeri lainnya untuk NGO feminis di negara-negara berkembang. Selain itu, melalui program-program bantuan luar negeri feminis di bawah naungan FIAP, Kanada berhasil mengadvokasi pentingnya diskusi mengenai gender dan wanita dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial global. Hal ini tentu menjadi sebuah bukti bahwa walau FIAP belum siap disebut sebagai kebijakan luar negeri feminis yang utuh, namun Kanada sudah menunjukkan progres yang positif ke arah sana.

Kritik Terhadap FIAP Kanada

FIAP menggunakan lensa Feminisme untuk menyorot dampak yang dirasakan oleh kaum wanita terhadap suatu kebijakan untuk menunjukkan bahwa kaum wanita secara masif merupakan pihak yang paling sering dirugikan dalam berbagai isu global⁴⁵. Dengan itu, Kanada yakin bahwa tujuan dan upaya-upaya FIAP yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dapat tercapai sepenuhnya⁴⁶. Akan tetapi, Cadesky mengkritik bahwa FIAP belum memiliki fondasi yang kuat sebagai kebijakan luar negeri feminis. Hal tersebut karena *pertama*, FIAP mencampuradukkan konsep “pemberdayaan wanita dan anak perempuan” dan “kesetaraan gender.” Sekilas, kedua konsep tersebut saling berkaitan dan memengaruhi. Akan tetapi, keduanya memiliki poin inti yang sangat berbeda. Kedua konsep ini dikenal juga dengan sebutan *gender equity* dan *gender equality*. ***Gender equity*** berarti pemerataan dan pemberdayaan yang setara antar gender; memberikan akses terhadap sumber daya kepada semua masyarakat tanpa terkecuali. Sementara ***gender equality*** berarti memperlakukan semua masyarakat dengan sama tanpa terkecuali. Dengan

mencampuradukkan kedua konsep ini tanpa penjelasan lebih mendetail tentang upaya-upaya pencapaiannya, FIAP masih belum cukup kuat sebagai kebijakan luar negeri feminis⁴⁷. *Kedua*, aspek interseksionalitas dalam FIAP masih kurang kuat. Hal ini berarti bahwa FIAP tidak lagi hanya berfokus pada dua identitas gender utama (pria dan wanita) tetapi juga identitas gender dan sosial lainnya, seperti: LGBTQ+, ras, etnis, agama, dan penyandang disabilitas. Hal ini tentu membuat visi dan misi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita FIAP menjadi jauh lebih kompleks⁴⁸. Sebab, identitas-identitas tersebut tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagai contoh: seorang penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas khusus agar dapat belajar dengan nyaman di sebuah universitas. Akan tetapi, ia juga seorang wanita sehingga membutuhkan hukum yang melindunginya dari pelecehan seksual dan diskriminasi. Lebih jauh lagi, Morton et al. berargumen bahwa FIAP masih belum menyorot atau mempertimbangkan para wanita yang dipenjarakan, pekerja seks komersial, trans-puan, dan para wanita pengguna narkoba⁴⁹. Semua ini harus masuk ke dalam pertimbangan agar tujuan-tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita di berbagai lapisan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam analisa penelitian, penulis menemukan bahwa kritik-kritik para penulis terdahulu memiliki penjelasan dan alasan yang signifikan. ***Pertama*, FIAP bukanlah kebijakan luar negeri feminis Kanada.** FIAP merupakan program bantuan pembangunan internasional yang dikembangkan oleh Global Affairs Canada

⁴⁵ GAC, “Canada’s Feminist International Assistance Policy.”

⁴⁶ GAC, 1.

⁴⁷ Jessica Cadesky, “Built on Shaky Ground: Reflections on Canada’s Feminist International Assistance Policy,” *International Journal* 75, no. 3 (September 10, 2020): 302–5, <https://doi.org/10.1177/2F0020702020953424>.

⁴⁸ Cadesky, 301–2.

⁴⁹ Morton, Muchiri, and Swiss, “Which Feminism(s)? For Whom? Intersectionality in Canada’s Feminist International Assistance Policy,” 339–40.

(GAC)⁵⁰. Hal ini dapat terlihat dari studi kasus yang telah penulis bahas sebelumnya, di mana CFLI (dengan dinaungi FIAP) rutin memberikan bantuan dana kepada Jakarta Feminist. diakui dan dijelaskan oleh Colin Wetmore bahwa FIAP bukan kebijakan luar negeri feminis Kanada dan bahwa kebijakan luar negeri feminis Kanada itu sendiri masih dalam tahap pengembangan dan formalisasi⁵¹. Maka dari itu, hal yang wajar apabila FIAP masih goyah untuk bisa disebut sebagai kebijakan luar negeri feminis, karena pada dasarnya, FIAP hanyalah sebuah payung besar yang menaungi seluruh program dan kinerja bantuan luar dan dalam negeri Kanada sejak dulu. Hal ini juga dibuktikan dengan kenyataan bahwa FIAP kurang memenuhi standar FFP seperti yang dikemukakan Thompson et al., yaitu bahwa suatu kebijakan luar negeri dapat dikatakan feminis apabila menjadikan isu ketidaksetaraan gender sebagai hal utama yang harus ditanggulangi⁵². FIAP Kanada justru berfokus pada capaian-capaian SDGs dengan sarana Feminisme. Walau Kanada menjadikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita sebagai bidang aksi inti, namun pada prakteknya bidang aksi tersebut berfungsi sebagai sarana semata, bukan tujuan yang harus dicapai. Mereka menggunakan agenda kesetaraan gender untuk mengukur dampak dari suatu fenomena atau kebijakan terhadap masyarakat, terutama wanita. Itu sebabnya, FIAP Kanada belum bisa disebut sebagai kebijakan luar negeri feminis, dan saat ini hanya dapat disebut sebagai bantuan luar negeri yang berorientasi feminis.

Kedua, FIAP tidak mencampuradukkan konsep kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, melainkan mempromosikan (*promoting*) atau mengarusutamakan. Hal ini telah berkali-kali disebutkan dalam Handbook

FIAP⁵³. Wetmore juga menjelaskan bahwa tujuan utama FIAP *bukanlah* mengubah struktur sosial atau pemerataan mobilisasi sumber daya terhadap kaum wanita, melainkan mempromosikan atau mengarusutamakan isu gender dalam politik global⁵⁴. Kanada sadar bahwa perubahan struktur bukan hal yang mudah untuk dicapai, terutama di dunia yang sudah memiliki struktur sosial yang mengakar kuat dan terintegrasi terhadap berbagai aspek, seperti ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, Kanada percaya bahwa langkah pertama dan utama yang harus dilakukan adalah dengan mengadvokasi isu gender dalam politik global. Selain itu, sebagai program bantuan luar negeri yang berorientasi feminis, lumrah apabila FIAP terkesan mencampuradukkan kedua konsep tersebut. Karena pada dasarnya, keduanya saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Ketika ingin mencapai kesetaraan, maka juga harus melakukan pemerataan. Jika terjadi pemerataan, maka kesetaraan dapat tercapai.

FIAP hadir dengan tujuan untuk menyorot permasalahan-permasalahan gender yang pada satu titik memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan global lainnya, seperti: kemiskinan, kesehatan, edukasi, konflik, dan perubahan iklim. FIAP bertujuan untuk mengadvokasi masyarakat dunia—termasuk juga negara dan institusi-institusi internasional—bahwa isu gender memiliki kepentingan yang krusial dan signifikan.

Ketiga, FIAP memang masih melakukan pengembangan terhadap aspek interseksionalitas dalam cakupannya. Akan tetapi, sama halnya dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, sejauh ini FIAP hanya mempromosikan atau mengarusutamakan isu tersebut. Melalui GBA+, FIAP mengadvokasikan dan mengarusutamakan isu-isu ras, gender, etnis, agama sebagai

⁵⁰ Wetmore, Everything about CFLI Indonesia.

⁵¹ Wetmore.

⁵² Thompson, "Feminist Foreign Policy: A Framework," 4–5.

⁵³ GAC, "Canada's Feminist International Assistance Policy."

⁵⁴ Wetmore, Everything about CFLI Indonesia.

aspek penting dan saling berkaitan dengan permasalahan-permasalahan global.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian terhadap kinerja FIAP Kanada dengan studi kasus bantuan CFLI Indonesia terhadap Jakarta Feminist (periode 2017–2021), penulis menyatakan bahwa kinerja FIAP Kanada sejauh ini menunjukkan hasil dan dampak yang positif terhadap advokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kinerja Jakarta Feminist selama pandemi COVID-19 dalam mengedukasi perempuan muda terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Selain itu, bantuan dari CFLI juga memungkinkan Jakarta Feminist untuk melaksanakan riset dan penelitian tentang peningkatan kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19.

Walau begitu, perlu digarisbawahi bahwa FIAP merupakan program bantuan luar negeri berorientasi feminis dibawah departemen Global Affairs Canada yang diinisiasi oleh Status Women of Canada. FIAP belum menjadi kebijakan luar negeri feminis yang melihat isu-isu gender sebagai permasalahan utama yang harus ditanggulangi. FIAP tercipta hanya untuk menaungi komitmen Kanada dalam mencapai perdamaian dan keamanan dunia dengan menggunakan agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Hal ini juga didukung dengan kenyataan bahwa FIAP menyelaraskan tujuannya dengan SDGs, dan *mengedepankan promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita karena berpendapat bahwa itu adalah cara paling efektif untuk memberantas berbagai isu global.*

Namun, walau begitu, penulis berpendapat bahwa komitmen yang ditunjukkan pada bidang aksi FIAP Kanada untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, sejauh ini, sangat

kuat. Kanada telah menunjukkan dedikasi dan upaya yang besar dalam menanggulangi permasalahan kesenjangan antar gender. Di samping itu, pendekatan FIAP Kanada dengan menyelaraskan bidang aksinya dengan SDGs merupakan hal yang patut disorot sebab hal ini memudahkan pengarusutamaan isu gender di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggestam, K. et al., “Theorising feminist foreign policy”, *International Journal*, Vol. 33, No. 1, 2018.
- Beasley, Chris, *What is feminism? An introduction to feminist theory*, Australia: Sage Publications, 1999.
- Cadesky, J., “Built on shaky ground: Reflections on Canada’s Feminist International Assistance Policy”, *International Journal*, Vol. 75, No. 3, 2020.
- Global Affairs Canada, “Canada’s Feminist International Assistance Policy” [online]. in https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf?_ga=2.41733986.1120564317.1653558061-173526061.1653558060, 2017, accessed at 26 May 2022.
- Global Affairs Canada, “The Canada Fund for Local Initiatives” [online]. in <https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/index.aspx?lang=eng>, 2015, accessed at 26 May 2022.
- Jakarta Feminist, “Laporan Penelitian: Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19”, [Laporan Penelitian], 2021b. Jakarta Feminist.
- Jakarta Feminist, “Laporan tahunan: Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta 2020”, [Laporan Tahunan], 2021a, Jakarta Feminist.
- MacDonnell, V., “Gender-Based Analysis Plus as Constitutional Implementation”, *La Revue du Barreau Canadien*, Vol. 96, 2018.
- Morton, S. E., et al., “Which feminism(s)? For whom? Intersectionality in Canada’s Feminist International Assistance Policy”, *International Journal*, Vol. 75, No. 3, 2020.
- Smith, S., “Introducing Feminism in International Relations Theory”, [online] <https://www.e-ir.info/2018/01/04/feminism-in-international-relations-theory/>, 2018.
- Status Women of Canada, “GENDER-BASED ANALYSIS: A guide for policy-making” [online]. in http://www.pacificwater.org/userfiles/file/IWRM/Toolboxes/gender/gender_based_analysis.pdf, 1998, accessed at 26 July 2022.
- Thompson, L., “Feminist Foreign Policy: A Framework”, Washington, DC: International Center for Research on Women, 2020.
- Thompson, L., et al., “Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update”, *International Center for Research on Women*, 2021.
- Thomson, J., “The Growth of Feminist (?) Foreign Policy”, *E-International Relations*, 2020a.
- Thomson, J., “What’s Feminist about Feminist Foreign Policy? Sweden’s and Canada’s Foreign Policy Agendas”, *International Studies Perspectives*, Vol. 21, No. 4, 2020b.
- Tickner, J. A., dan Sjoberg, L., *Feminism and International Relations: Conversations about the past, present and future*, Milton Park: Routledge, 2013.
- Wetmore, C., [private interview], 2022.
- Zaqiah, N. R., [private interview], 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Colin Wetmore (First Secretary dan Program Manager Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) Indonesia–Timor Leste) dan Naila Rizqi Zakiah (Officer Advokasi Jakarta Feminist) yang telah bersedia untuk diwawancara peneliti dan dengan suka rela memberikan ilmu serta informasi terkait topik penelitian. Terima kasih kepada Musa Maliki (dosen dan peneliti ilmu Hubungan Internasional) dan M. Chairil Akbar Setiawan (dosen dan peneliti ilmu Hubungan Internasional) yang telah membimbing dan mengarahkan seluruh proses penelitian. Terima kasih kepada Nita C. Soetego (Aksek/LPK Tarakanita) yang telah membantu dalam penyuntingan dan revisi naskah jurnal penelitian ini.